

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional.

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak disegala aspek kehidupan. Pada awal abad XXI ini telah ditemukan begitu banyak korban yang sebagian besar adalah remaja. Selalu penuhnya pasien di berbagai rumah sakit ataupun lembaga yang memberikan perawatan dan rehabilitasi terhadap penderita ketergantungan narkotika dan obat-obat terlarang, memunculkan dugaan total penggunaanya ribuan orang dan 97% pasien adalah remaja yang usianya antara 15-20 tahun.¹

Berdasarkan hasil Survey Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia Tahun 2009 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau yang lebih dikenal dengan BNN yang bekerjasama dengan Puslitkes Universitas Indonesia, terkait situasi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia maka diketahui bahwa prevalensi penyalahgunaan di Indonesia setahun terakhir sebesar 4,7% . Ini berarti 1 dari

¹ *Forum Keadilan*, Oktober, 1999, hlm. 23.

20 orang pelajar/mahasiswa pernah menyalahgunakan Narkoba. Dari total populasi pelajar SMP, SMA dan mahasiswa sebesar $\pm 19.610.532$ orang, diperkirakan sekitar 4,7% nya atau ± 921.695 orang pernah menyalahgunakan Narkoba. Survey ini mencakup pelajar SMP, SMA dan mahasiswa. Lokasi survey di 33 propinsi dengan rincian dari 28 propinsi diambil 1 kota dan 1 kabupaten, sedangkan 5 propinsi lainnya diambil 1 kota dan 2 kabupaten. Jumlah sampel per kota/kabupaten sekitar 1.200 responden. Selain itu di tiap-tiap propinsi juga di ambil cadangan responden sebanyak 50 orang. Adapun perkiraan total responden dalam survey ini adalah 86.850 responden.

Sukoharjo secara sosiologis menyimpan karakter yang bersifat dualisme atau berwujud ganda. Kota bukan, desa juga bukan. Sukoharjo saat ini tengah memasuki masa transisi, dengan dukunga mobilitas yang cukup tinggi. Hal ini sebagai akibat dari *booming* tekstil yang merambah ke pasaran ekspor, yang mengakibatkan banyaknya pendatang yang berdatangan ke Sukoharjo. Mereka berdatangan ke Sukoharjo dengan tujuan melakukan bisnis dan perdagangan tekstil baik sebagai *buyer* (pembeli) maupun sebagai *investor* (penanam modal).

Hal tersebut mengharuskan para remaja khususnya di Sukoharjo dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan dengan adanya filter atau penyaring dalam menerima masuknya budaya asing di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, maka dikhawatirkan para remaja itu akan hanyut dan terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti penyalahgunaan

narkotika dan obat-obat terlarang yang dapat merugikan bagi dirinya sendiri, masyarakat dan bangsa.

Melihat kenyataan ini, maka fungsi dan peranan Kepolisian di uji dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang, dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah bentuk-bentuk/jenis-jenis Narkotika dan obat-obatan terlarang yang beredar di Sukoharjo ?
2. Faktor-faktor apa saja penyebab penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja ?
3. Bagaimana upaya Kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk/jenis-jenis Narkotika dan obat-obatan terlarang yang beredar di Sukoharjo.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak penyidik khususnya mengenai pengaturan hukum dalam rangka penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

E. Kerangka Pemikiran

Penyalahgunaan obat ini menurut Soedjono Dirdjosisworo, yaitu “pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan

narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara”.²

Narkotika dan jenis obat-obatan adalah zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan bagi upaya penyembuhan dan pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan (pendidikan, latihan, ketrampilan, penelitian), namun demikian produksi dan peredaran gelap serta penyalahgunaannya ternyata menimbulkan dampak negatif yang berbahaya bagi individu karena menimbulkan ketergantungan atau merusak fisik, mental, merugikan secara materi yang selanjutnya dapat merusak remaja sebagai penerus atau pemimpin bangsa, menghambat tercapainya tujuan pembangunan mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, menimbulkan kriminalitas, serta mengganggu stabilitas keamanan, melemahkan ketahanan nasional dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mempertahankan ketertiban bangsa dan menanggulangi semakin merajalelanya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, maka pemerintah makin memperketat pembatasan dan pengawasan peredarannya. Salah satu langkah awal pemerintah adalah dengan mengatur cara penyediaannya dan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang hanya untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan, serta mencegah dan menanggulangi bahaya yang dapat ditimbulkan dari akibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 3.

Ketentuan mengenai peran serta pemerintah dan masyarakat dalam masalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pokok isinya adalah:

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
2. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang bila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
3. Pemerintah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat yang melapor.
4. Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang atau pengungkapan tindak pidana narkotika dan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan atau lainnya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kepolisian sebagai aparat yang berwenang dalam hal ini berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat bertindak dengan efisien, polisi mengembangkan persepsinya sendiri mengenai masyarakat yang harus dilayaninya serta didisiplinkannya. Secara sistematis hal itu dilakukan dengan kesiapan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok orang tertentu yang dihadapinya sebagai sebuah petunjuk akan adanya suatu bahaya atau ancaman bagaimanapun samanya petunjuk tersebut.

Dalam hukum biasanya polisi melakukan tindakan yang sifatnya prefentif maupun represif yang bertujuan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah pada terjadinya tindak pidana, dan dalam penulisan hukum ini diksususkan mengenai upaya Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,³ yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan remaja serta upaya penanggulangannya oleh kepolisian dan badan narkotika kabupeten dikabupaten sukoharjo.

³ Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 35. “ Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.”

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini mengkaji tentang upaya Kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten dalam tindakan preventif serta represif penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang berdasarkan undang-undang yang ada. Pendekatan empiris mengkaji tentang bentuk dan jenis-jenis narkoba dan obat-obatan terlarang, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba, obat-obatan terlarang, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan pihak kepolisian dan badan narkoba kabupaten dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Sukoharjo.

3. Jenis dan Teknik pengumpulan data

a. Sumber Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari tokoh yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan masalah penelitian di Polres Sukoharjo dan Badan Narkotika Kabupaten yang menangani langsung kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang di Sukoharjo

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang terkait dengan peranan Kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten dalam menangani langsung kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di Sukoharjo.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka atau data tertulis, baik berupa Kitab Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, ataupun surat kabar serta bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴ Wawancara ini dilakukan secara langsung terhadap pengguna narkoba, petugas kepolisian dan petugas badan narkoba kabupaten di wilayah Sukoharjo.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Yaitu pengujian tanpa menggunakan angka – angka atau model – model matematis dan rumusan – rumusan statistik, kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Penyajian data secara deskriptif analisis disini adalah pengolahan data tanpa menggunakan model matematis dan rumusan-rumusan statistik, tetapi penyajian data langsung berupa deskriptif sehingga pembaca mudah memahaminya.

⁴ Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 186.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tindak pidana narkoba, konsep remaja, dan tinjauan hukum tentang penegakan hukum.

Bab III Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai apa saja bentuk-bentuk/jenis-jenis narkoba dan obat-obatan terlarang yang beredar di Sukoharjo. Faktor-faktor apa saja penyebab penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang serta upaya kepolisian dan badan narkoba kabupaten dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kabupaten Sukoharjo serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan.

Bab IV Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian.